

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana tata kelola kewarganegaraan, juga dikenal sebagai tata kelola kewarganegaraan, dapat digunakan untuk mengatasi dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan identitas ganda di Pulau Sebatik. Di daerah perbatasan, masalah identitas ganda merupakan fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan identitas masyarakat selain masalah hukum. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data, yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menetapkan kewarganegaraan tunggal di Indonesia, banyak orang yang memiliki dua kewarganegaraan di daerah perbatasan. Ini karena ada perbedaan antara aturan formal dan kehidupan sosial masyarakat. Karena mobilitas lintas batas yang tinggi dan kekurangan kontrol administratif, batas keanggotaan kewarganegaraan belum sepenuhnya efektif dari segi luas. Dalam hal konten, masyarakat cenderung memanfaatkan hak-hak kedua negara tanpa memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan lebih pragmatis, di mana masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan finansial dan kebutuhan hidup daripada komitmen nasional. Fenomena ini dipicu oleh keterbatasan ekonomi, ketergantungan masyarakat terhadap Malaysia, dan akses ke layanan publik.

Dengan demikian tata kelola kewarganegaraan di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan sosial. Perbaikan integrasi data kependudukan, peningkatan pengawasan, dan penerapan pendekatan kebijakan yang lebih sesuai dengan keadaan lokal masyarakat perbatasan diperlukan.

Kata kunci: administrasi kewarganegaraan, identitas ganda, wilayah

perbatasan, Pulau Sebatik

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how citizenship governance, also known as citizenship management, can be used to address and resolve issues related to dual citizenship on Sebatik Island. In border areas, dual citizenship is a complex phenomenon influenced by social, economic, cultural, and community identity factors, in addition to legal issues. This study employed a qualitative descriptive method, involving data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The Miles and Huberman interactive model was used to analyze the data, including data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results show that, despite Law Number 12 of 2006 establishing single citizenship in Indonesia, many people hold dual citizenship in border areas. This is due to a discrepancy between formal regulations and community social life. Due to high cross-border mobility and a lack of administrative controls, citizenship membership boundaries have not been fully effective in terms of breadth. In terms of content, people tend to utilize the rights of both countries without fulfilling their obligations as Indonesian citizens. On the other hand, the study indicates that citizenship identity is more pragmatic, with people prioritizing financial and living needs over national commitments. This phenomenon is driven by economic constraints, community dependence on Malaysia, and access to public services.

Therefore, citizenship governance in border regions still faces a number of structural and social challenges. Improved population data integration, enhanced oversight, and the implementation of policy approaches more tailored to the local circumstances of border communities are needed.

Keywords: citizenship administration, dual citizenship, border areas, Sebatik Island